



## **ANALISIS PERBEDAAN KEBIJAKAN KONTRATERORISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP KELOMPOK TERORIS ISIL (*Islamic State of Iraq and Levant*) DAN BOKO HARAM TAHUN 2014 – 2016**

**Nabilla Ayu Sekarini Santoso**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto., S.H, Tembalang, Semarang, 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

After 9/11, the U.S. have been so adamant on eradicating terrorism all over the world, and adopted a foreign policy that focuses on counterterrorism named ‘war on terror’. The war on terror have been targeting terrorist groups like al-Qaeda, and most recently, its foremost focus is on ISIL. While the U.S. promised to erase all terrorism in the world, the policy still has some imbalance towards whom it applies to. Towards ISIL, the U.S. and its coalition have made subsequent progress on their counterterrorism efforts while towards other groups, such as Boko Haram, the policy application has been stagnant with not much progress. This thesis is a qualitative research using Mill’s Method of comparative study to see the differences of each policy and will explore and analyze the reasons why the counterterrorism effort of the U.S. is unequal, focusing on its differences of counterterrorism policy towards ISIL and Boko Haram using Analytical Eclecticism as a tool. Furthermore, this thesis will also incorporate defensive realism and liberal internationalism to analyze the possible reasons on why U.S.’s counterterrorism policy has a difference between whom it applies to. The result of this study shows that U.S. have a political interest in Syria including its rivalry with Russia and its needs to contain Russia’s power in the Middle East and its interest to topple Assad from the Syrian government.

**Keywords:** *ISIL, Boko Haram, counterterrorism, policy analysis, U.S. foreign policy, liberal internationalism, defensive realism*

### **Pendahuluan**

Sejak peristiwa 9/11 yang menimpa AS terorisme telah mengalami begitu banyak perkembangan. Sebagai negara hegemoni, AS kemudian mencanangkan kebijakan kontraterorisme dalam skala global yang disebut dengan ‘*Global War on Terror*’ atau GWOT, yang dimulai dengan operasi militer AS ke Afganistan pada 7 Oktober 2001 (Council on Foreign Relations t.th.). Tujuan dari GWOT ini sendiri adalah untuk membasmi terorisme di segala penjuru dunia dengan tidak memberikan celah atau kesempatan untuk kelompok-kelompok teroris ini melakukan aksi kekerasan yang mengatasnamakan sebuah identitas dengan maksud atau tujuan politik. Meskipun AS telah berkomitmen untuk memerangi semua bentuk terorisme dimanapun ia tumbuh, masih terdapat beberapa ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kontraterorsime AS ini.

Merujuk kepada kebijakan kontraterorisme AS terhadap ISIL dan Boko Haram, contohnya. Dalam usahanya menumpas ISIL, Departemen Pertahanan AS menunjukkan bahwa AS menghabiskan US\$7.5 miliar dengan rata-rata \$11.7 juta per hari untuk 674 hari sejak operasi ke Irak dan Suriah dilaksanakan pada 8 Agustus 2014 (U.S. Department of Defense, t.thn.) Sementara itu, AS menggelontorkan dana sebanyak US\$45 juta per Februari 2015 sebagai bantuan militer, US\$40 juta untuk membantu program kontra-terorisme gabungan Chad, Niger, Kamerun dan Nigeria dan \$195 juta USD pada 2015 dan 2016 sebagai bentuk bantuan terhadap korban Boko Haram, termasuk *refugee* dan *internally displaced persons* (IDP), sehingga total AS mengeluarkan dana sebanyak US\$280 juta untuk kontra-terorisme Boko Haram (U.S. Department of State, 2016).

Selain segi dana, ketimpangan kebijakan kontraterorisme juga terletak pada tidak adanya operasi militer terhadap Boko Haram, meskipun data-data menunjukkan bahwa Boko Haram telah dinobatkan sebagai kelompok teroris paling berbahaya di dunia pada tahun 2015, menurut *Global Terrorism Index* yang dirilis oleh *Institute for Economic and Peace*. Boko Haram telah menimbulkan korban sebanyak 6.644 jiwa pada 2014 dan meningkat sebanyak 317% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana ISIL menempati peringkat kedua dengan 6.073 korban jiwa (Institute for Economic and Peace, 2015). Boko Haram juga memiliki jumlah tentara yang sebanding dengan ISIS, yaitu 20.000 tentara (Zenn, 2014) yang membuatnya memiliki derajat ancaman yang bersaing dengan ISIL. Sifat Boko Haram jauh lebih terstruktur, termotivasi dan memiliki tujuan (Blair, 2015) membuatnya berhasil telah mengklaim wilayah seluas 20.000 km<sup>2</sup>, setara dengan luas wilayah Belgia. Boko Haram juga telah menyebabkan ketidakstabilan regional, terutama di wilayah Danau Chad, dan diklaim memiliki kekuatan militer yang lebih efektif, lebih intelijen dan lebih efisien daripada militer nasional Nigeria (Adibe 2015).

Dari data-data tersebut, dapat dipahami bahwa Boko Haram juga memiliki potensi menimbulkan kekerasan dan instabilitas yang sama parahnya dengan ISIL, sehingga penulis kemudian menyimpulkan bahwa ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kontraterorisme AS layak diteliti sebabnya. Penelitian ini kemudian berargumen bahwa penyebab dari terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kontraterorisme AS adalah pertama, selain kepentingan untuk melakukan kontraterorisme terhadap ISIL, AS juga memiliki kepentingan di Suriah yang menjadi *breeding ground* ISIL yang berkaitan dengan persaingan politiknya dengan Rusia yang memiliki kepentingan politik yang berseberangan dengan AS dan kedua, berkaitan dengan hipotesis pertama, AS ingin menurunkan Presiden Bashar al-Assad yang tidak menunjukkan sikap baik terhadap AS dan mendirikan institusi demokratis sebagai usahanya untuk mengakhiri ketidakstabilan regional dan mempermudah usahanya untuk mengalahkan ISIL.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori eklektisisme untuk membantu menganalisis kebijakan kontraterorisme AS. Eklektisisme adalah sebuah logika pemikiran yang tidak terbatas pada satu paradigma saja sehingga mempertajam analisis yang dilakukan oleh penulis. Untuk melakukan analisis yang akurat dan lebih tajam, penulis menggunakan paradigme defensif realis dan liberal internasionalisme sebagai alat bantu analisis problematika yang diusung.

## **Pembahasan**

Dalam usaha kontraterorismenya, AS memiliki serangkaian operasi militer dan pelatihan militer yang dilaksanakan di beberapa wilayah. Operasi militer AS yang paling relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, *Operation Enduring Freedom – Trans-Sahara* (OEF-TS)

yang bertujuan untuk memberikan pelatihan militer kepada negara-negara di Afrika Barat dan Utara yang mencakup Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Mali, Mauritania, Moroko, Niger, Nigeria, Senegal dan Tunisia. Dalam OEF-TS, AS bersama AFRICOM<sup>1</sup> memberikan pelatihan, saran dan dukungan seperti *sharing* informasi kemiliteran, pelatihan militer yang bersifat transnasional, deradikalisasi ideologi ekstremis, mempertahankan operasi militer di cakupan regional, membangun profesionalitas dan akuntabilitas kemiliteran, memberikan dukungan dalam bidang logistik dan pengangkutan udara serta dukungan terhadap pasukan udara dan pasukan darat.

Untuk lebih spesifiknya, kebijakan kontraterorisme AS terhadap Boko Haram melalui rangkaian OEF-TS ini adalah dengan memberikan pelatihan terhadap pasukan militer nasional Nigeria serta memberikan penataran mengenai *border security* dan *crisis management* terhadap pemerintahan Nigeria (U.S. Department of State 2014). AS juga memberikan bantuan *drone* atas permintaan pemerintahan Nigeria dalam usahanya untuk membawa pulang gadis-gadis Chibok yang ditahan oleh Boko Haram. AS juga telah mengalokasikan dana sebanyak US\$79 juta pada 2015 untuk kepentingan *counterterrorismcapacity building* di Kamerun, Chad dan Nigeria. Sementara untuk kepentingan *intelligence, surveillance and target acquisition capacity building*, telah dialokasikan dana sebanyak US\$ 30 juta untuk memaksimalkan *intelligence sharing* antara Nigeria dan negara-negara tetangga (U.S. Department of State 2014).

Sementara itu, operasi militer AS yang bertujuan untuk menumpas ISIL disebut dengan *Operation Inherent Resolve* (OIR). Operasi militer ini telah melaksanakan 78% dari 9.300 serangan udara yang dilaksanakan di Suriah per 3 Januari 2016 (Department of Defense 2015, 1) dan telah menghabiskan dana sebanyak lebih dari US\$ 11 miliar per 31 Desember 2015 (Department of Defense 2015, 18). Jumlah dana tersebut bertambah dengan dianggarkannya US\$715 juta untuk *Iraq Train and Equip Fund* (ITEF)<sup>2</sup>, US\$ 80 juta untuk keperluan asistensi keamanan pemerintahan AS di Irak dan US\$ 531 juta untuk pembentukan *Syria Train and Equip Fund* (STEF)<sup>3</sup>. Lebih spesifiknya, AS juga melakukan serangan udara terhadap lokasi-lokasi yang vital bagi ISIL di Suriah dan Irak seperti Raqqa, Ramadi dan Deir ez-Zor. Serangan-serangan udara beserta bantuan militer yang diberikan AS untuk mengalahkan ISIL menghabiskan total dana sebanyak US\$7.6 milyar yang rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Total Dana (per juta Dollar) Untuk Keperluan Kontraterorisme ISIL Sejak Dimulainya OIR hingga 15 Mei 2016**

Perkiraan Total Dana	Total Dana	% dari Total Dana
<b>Bantuan Berdasarkan Kategori</b>		
Bantuan Logistik	\$1.140	15%
Bantuan Operasional	\$1.124	15%

<sup>1</sup>AFRICOM merupakan singkatan dari *US Africa Command*, merupakan satu dari enam komando militer AS di tingkat regional yang bertanggungjawab dan beroperasi di Afrika. AFRICOM juga bertanggungjawab atas segala tindakan militer yang terjadi di Afrika. Mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2007 dan menjadi komando independen di tahun berikutnya (AFRICOM n.d.).

<sup>2</sup>*Iraq Train and Equip Fund* adalah program OIR yang berfokus terhadap empat elemen penting dalam usaha pembentukan kapasistas di Irak, yakni *assist, train, equip* dan *reform* (Department of Defense 2015, 49).

<sup>3</sup>*Syrian Train and Equip Fund* merupakan program OIR yang berfokus kepada pelatihan kapabilitas militer, modernisasi kemiliteran serta stabilisasi daerah konflik yang berfokus di Suriah. Program pelatihan ini dimulai pada 9 Mei 2015 (Department of Defense 2015, 43).

ISR	\$51	1%
OPTEMPO <sup>4</sup>	\$3.520	46%
Pembayaran Militer	\$41	1%
Perlengkapan Militer	\$1.741	23%
<b>Total</b>	<b>\$7.582</b>	<b>100%</b>
<b>Bantuan Berdasarkan Servis</b>		
Angkatan Darat	\$1.093	14%
Angkatan Laut	\$823	11%
Angkatan Udara	\$5.080	67%
SOCOM	\$585	8%
<b>Total</b>	<b>\$7.581</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Operation Inherent Resolve: Quarterly Report to Congress (April 1, 2016 – June 30, 2016)* hal. 17

Setelah meninjau kedua kebijakan kontraterorisme AS terhadap dua kelompok teroris yang berbeda, dapat dilihat terdapat perbedaan yang sangat besar dalam jumlah alokasi dana serta tidak adanya bantuan berupa serangan militer untuk membasmi Boko Haram. Padahal, seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, kedua kelompok memiliki derajat ancaman yang setara. Boko Haram telah dinobatkan sebagai kelompok teroris paling berbahaya di dunia yang bertanggungjawab atas korban nyawa lebih dari 11.000, namun AS justru lebih getol dalam usahanya untuk memberantas ISIL dibandingkan Boko Haram. Dalam argumen penulis disebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena banyaknya kepentingan AS di Suriah, yang dipicu oleh keterlibatan Rusia dalam perang sipil Suriah dan kepentingan politiknya yang berseberangan.

Menteri Pertahanan AS Ashton Carter, menyatakan bahwa keterlibatan militer Rusia *doomed to fail* dan akan memperburuk perang sipil yang tengah berlangsung di Suriah. Ia juga menyebutkan bahwa “*the approach (Russia’s military involvement) is tantamount...to pour a gasoline on the fire,*” (BBC 2015). Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sama-sama memerangi ISIL dan mengancam tindakan terorisme yang tengah terjadi, namun perbedaan di antara keduanya adalah pendapat Rusia yang menyatakan bahwa Presiden Basar Al-Assad merupakan kunci dari terselesaikannya masalah insurgensi ISIL; dimana AS justru mengancam pemerintahan Basar Al-Assad yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil Suriah.

Dalam teori realisme, sistem internasional dapat dicirikan dengan konflik, kecurigaan dan kompetisi antarnegara (Burchill 2005, 32) dan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara adalah dengan menganalisis kepentingan nasionalnya. Kepentingan AS dalam melibatkan dirinya di usaha kontraterorisme ISIL yang semula hanya untuk mengalahkan ISIL dan mencegah timbulnya potensi terorisme yang lebih besar dengan adanya *vacuum of power*, bertambah menjadi mempertahankan *status quo* agar Rusia tidak menjadi *dominant power* di Timur Tengah. Dalam esai yang ditulis oleh Berman, disebutkan bahwa “*...the United States felt that they had to intervene in order to maintain their hegemonic status... an Assad-Russia victory would have significantly helped Russia transform the*

<sup>4</sup>Menurut definisi dari kemiliteran AS, OPTEMPO berarti durasi dalam serangan udara atau durasi operasi militer tersebut. Dalam konteks di atas dapat diartikan sebagai dana yang telah dihabiskan dalam operasi militer yang dilaksanakan oleh militer AS selama OIR.

*international balance of power into a multipolar world...*” (Berman 2017, 34). Pernyataan di atas dapat membuktikan bahwa dukungan dari Rusia dan keterlibatannya secara politik dan militer di Suriah menghalangi kepentingan AS untuk melakukan pergantian rezim dan mempertahankan status AS sebagai garda terdepan dalam penanganan terorisme dan *presence*-nya di Timur Tengah (Issa 2016).

Keberadaan Rusia yang ikut terlibat di Suriah secara langsung menjadi tantangan bagi AS dalam menjaga unipolaritas sistem internasional saat ini, dan jika Rusia berhasil mempertahankan Assad, potensi munculnya koalisi antara Rusia-Iran-Suriah dapat mengganggu potensi AS memegang kendali penuh di Timur Tengah (Berman 2017, 38). Rusia juga tidak mundur dalam usahanya untuk melakukan *display of power* agar ia kembali menjadi *the big power* dalam sistem internasional. Dalam argumennya, Waltz, menyatakan bahwa, “...*the first concern of states is not to maximize power but to maintain their positions in the system.*” (Waltz 1979, 126) yang selanjutnya didukung oleh Snyder yang menyatakan, “...*states that do achieve hegemony are still not satisfied; they will seek to prevent the rise of “peer competitors”*” (Snyder 2001, 152). Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang realis dapat menjelaskan *state behavior* AS yang ingin mempertahankan statusnya sebagai negara hegemoni.

Selain persaingan politiknya dengan Rusia, AS menyebutkan bahwa ISIL akan terus membahayakan baik dalam skala regional maupun global (White House 2014), dimana ISIL juga dapat mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyerang negara-negara barat sekutu AS, seperti teror di Paris, Perancis pada Januari 2015. Selain itu, jumlah *foreign fighter* dan simpatisan ISIL dari negara-negara barat yang paham strategi yang efektif untuk menyerang negara-negara barat semakin mengancam keamanan *homeland security* AS (Institute for Economic & Peace 2015, 48). Jika dibandingkan dengan Boko Haram, yang meskipun dinilai lebih berbahaya daripada ISIL, kelompok tersebut tidak memiliki ancaman langsung terhadap keamanan nasional AS. Eksistensi Boko Haram adalah ancaman yang besar bagi Nigeria dan negara-negara di sekitarnya, namun ia tidak mengancam keamanan nasional AS dan tidak seperti ISIL, Boko Haram tidak memiliki simpatisan dan *foreign fighters* dari negara-negara barat yang berpotensi dapat melakukan tindakan teroris di negara-negara asalnya (Campbell 2014, 19). Langkanya *foreign fighters* dalam struktur Boko Haram dibandingkan dalam ISIL dikarenakan oleh dua hal, yakni sosial media dan jangkauan geografi (Calabria 2015). Langkah yang tepat bagi AS untuk mengatasi Boko Haram bukan dengan *display of hard power* seperti yang dilakukan di Suriah dan Irak, namun dengan hubungan bilateral yang konstan.

Dalam defensif realis, Waltz memang menggarisbawahi bahwa memaksimalkan *power* melalui *conquest* adalah suatu hal yang berbahaya, namun perlu diperhatikan bahwa Waltz juga menyatakan bahwa negara mencari “...*wealth, advantage and flourishing; peaceful coexistence; peace and prosperity; protection to their sovereignty and independence; they (states) will act out of pride and the feeling of being put upon.*” (Burchill 2005, 42). Seperti negara-negara lain, AS juga menghendaki perdamaian dan keamanan di sistem internasional selain keinginan AS untuk mempertahankan *status-quo*. Rasa aman dan damai tersebut dirusak ketika peristiwa 9/11 terjadi, yang kemudian mendorong AS untuk menjalankan operasi *War on Terrorism* dimana OIR merupakan bagian dari skema besar kebijakan kontraterorisme AS. Kemunculan ISIL dalam sistem internasional yang memiliki sentimen terhadap dunia barat tentu merupakan ancaman bagi AS; jika tidak segera di’jinak’kan, bukan tidak mungkin 9/11 jilid dua dapat terjadi. Maka dari itu, dapat dikatakan AS melakukan tindakan defensif untuk melindungi dirinya dari *external threat* dengan menggunakan kapabilitas militernya, sehingga hipotesis awal penulis yang

menyatakan bahwa AS memiliki kepentingan yang lebih banyak di Suriah berkaitan dengan persaingan politiknya dengan Rusia terbukti benar. Meskipun begitu, penulis kemudian menemukan bahwa hal tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan AS terjun penuh dalam usaha kontraterorisme ISIL.

Selanjutnya, penulis juga menganalisis *state behavior* AS melalui sudut pandang liberal internasionalisme untuk membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa AS menginginkan Assad untuk turun dari jabatannya serta adanya pendirian institusi pemerintahan yang demokratis dalam usahanya untuk mengatasi ketidakstabilan regional dan kontraterorisme ISIL. Tujuan utama AS adalah untuk membasmi ISIL, tetapi mengakhiri perang sipil Suriah, membendung pengaruh Rusia di Timur Tengah dan menurunkan Assad dari jabatan kepresidenan juga merupakan beberapa kepentingan AS (Herrera, Kydd and Lukyanov 2015, 4).

Dalam usaha AS untuk mengembalikan kestabilan di Suriah dan mengakhiri perang sipil, PBB bersama utusan khusus untuk Suriah, Staffan de Mitsura, mengadakan dua konferensi di Wina, Austria pada tahun 2015 (30 Oktober dan 14 November 2015) dan membentuk *International Syria Support Group*, dimana Rusia dan AS merupakan ketua *joint-group*. Deklarasi Wina menghasilkan beberapa poin dengan merujuk ke Konferensi Jenewa II untuk Suriah (2012)<sup>5</sup> yang meliputi pergantian sistem politik dan rezim akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Suriah, *owned and led*; PBB akan mengundang pemerintah Suriah dan grup oposisi untuk memulai mediasi terkait proses politik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung, dan diwajibkannya gencatan senjata dan perbanyak bantuan kemanusiaan.

Selain usaha negosiasi, AS juga memberikan bantuan berupa *nonlethal assistance* untuk Suriah dan kelompok oposisi yang disetujui oleh FY2016 dan dilaksanakan oleh *International Narcotics and Law Enforcement (INCLE)* dan *Peacekeeping Operations (PKO)* dimana program tersebut bertujuan untuk mendirikan pemerintahan Suriah yang representatif, inklusif dan akuntabel; memperluas peran perempuan dalam negosiasi untuk mengakhiri kekerasan di Suriah dalam pergantian rezim; mengembangkan dan mengimplementasikan pergantian rezim yang demokratis, transparan dan taat hukum; mengembangkan masyarakat sipil dan media independen Suriah; mendokumentasikan, menginvestigasi dan mempersekusi pelanggaran HAM di Suriah; mengembangkan ideologi kontra-ekstrimisme; memberikan asistensi untuk menyelesaikan pendidikan kepada para pengungsi perang sipil Suriah, dan; memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok rawan di perbatasan Suriah (Blanchard, Humud and Nikitin 2016, 22).

Meskipun usaha negosiasi untuk proses pergantian rezim ini tidak pernah berjalan lancar, AS tetap mempercayai bahwa satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perang sipil adalah dengan menurunkan Presiden Al-Assad dari jabatannya dan mendirikan institusi yang demokratis. Keteguhan AS pada pendapatnya bahwa pergantian rezim otokrasi ke rezim yang lebih demokratis akan mengakhiri konflik dapat dianalisis dari sudut pandang liberal internasionalisme yang berfokus pada ide dasar bahwa demokrasi adalah penangkal dari konflik dalam sistem internasional. Akan ditinjau pula konsep kepentingan nasional dari sudut pandang liberalis, yang menekankan kepada terwujudnya perdamaian internasional.

Sudut pandang liberalis beranggapan bahwa perdamaian merupakan hal yang wajar, sehingga bila terjadi perang, hal tersebut dikarenakan oleh pemerintahan militaristik dan tidak

---

<sup>5</sup> Konferensi Jenewa II untuk Suriah dilaksanakan pada tahun 2012 dengan tujuan ‘mendamaikan’ konflik di Suriah dengan mengundang pemerintahan Suriah dan beberapa kelompok oposisi. Konferensi Jenewa II membahas proses pergantian rezim di Suriah yang pada akhirnya tidak disetujui oleh pihak Suriah, yang menolak untuk menurunkan Bashar al-Assad dari kedudukannya (BBC 2014).

demokratis. Kant menyebutkan bahwa solusi dari peperangan yang terjadi adalah dengan menyebarkan paham liberalisme dan menambah jumlah negara yang menganut sistem demokrasi, yang kemudian ditambahkan oleh Doyle yang menyebutkan bahwa negara-negara liberal-demokrasi memiliki sifat unik dimana mereka dengan sukarela membangun hubungan yang damai dengan satu sama lain. Menurut Doyle, sinkronisasi negara-negara liberal-demokrasi yang memiliki prinsip yang sama, yakni komitmen terhadap hukum; hak individual dan kesetaraan dihadapan hukum; dan pemerintahan yang didasarkan oleh konsesus, dapat berarti bahwa negara-negara tersebut tidak tertarik untuk memulai konflik dengan satu sama lain (Doyle 1986, 1161). Rawls kemudian menambahkan meski negara-negara liberal-demokratis memiliki ketertarikan yang kecil untuk memulai konflik dengan negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi, mereka akan melakukan *self-defense* (secara militeristik, baik untuk diri sendiri ataupun aliansi) atau untuk mengintervensi kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat (Rawls 1999, 49).

Paradigma liberal berpendapat bahwa perdamaian merupakan hal yang diharapkan dari sistem internasional. Pemikiran tersebut kemudian diterapkan sebagai landasan dari banyak kebijakan luar negeri negara-negara yang menganut sistem liberal-demokrasi, termasuk AS. Pemikiran ini secara umum beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang ideal yang dapat menciptakan perdamaian domestik maupun internasional sehingga penyebaran sistem politik yang liberal dan demokratis merupakan suatu kewajiban. Pandangan ini juga sering disebut sebagai Wilsonianisme dan menjadi ciri khas kebijakan luar negeri AS yang dijelaskan sebagai, "...aims at expanding democracy and free trade, at defending democracy from its foes, at quarantining repressive and pariah states, and at protecting and promoting human rights." (Hoffman 1995, 159)

Paradigma ini juga beranggapan bahwa absennya sistem politik yang demokratis membuat negara dunia ketiga (dalam hal ini merujuk ke negara-negara yang tidak menganut sistem liberal-demokratis) rawan perang dan terorisme (Jahn 2013, 77) sehingga dalam proses untuk menciptakan perdamaian internasional, negara-negara yang tidak menganut sistem liberal-demokratis dapat menjadi sasaran penyebaran demokrasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional dalam pandangan liberal internasionalisme merupakan penyebaran paham demokrasi terhadap negara-negara non-liberal untuk menjaga perdamaian domestik dan internasional (Jahn 2013, 75). Menurut logika tersebut, sikap AS yang gigih dalam usahanya untuk melakukan pergantian rezim di Suriah merupakan upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

Untuk menegaskan keinginan AS dalam pergantian rezim di Suriah dan mengimplementasikan sistem demokrasi, Presiden Obama menyatakan bahwa:

[cetakan tebal dari penulis] *...the United States has joined with nations around the world in calling for an end to the Assad regime and a transition that leads to a peaceful, inclusive and democratic Syria, where the rights of all Syrians are protected.* (White House Office of Secretary 2013)

Pernyataan Presiden Obama di atas kemudian diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertahanan AS John Kerry, yang juga menegaskan pentingnya pergantian rezim ke pemerintahan yang lebih demokratis dan determinasi AS untuk membangun sistem yang demokratis di Suriah sebagai salah satu upayanya dalam kontraterorisme ISIL:

[cetakan tebal dari penulis] *... the outcome that we are aiming for is one in which Bashar al Assad and those who have been associated with his atrocities in Syria are removed, but the structures of government ... remain in an inclusively governed way*

*that is multi-sectarian to include Alawites and others and that can then turn to the task of regaining its sovereign territory from ISIL ... That is the post-Assad transition that will be the best for the Syrian people and the best for our counter-ISIL strategy.* (Blanchard, Humud and Nikitin 2016, 16)

Sementara itu, urgensi AS untuk terus mengawasi pergantian rezim di Suriah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri AS Tillerson:

[cetak tebal dari penulis] *...a stable, unified, independent Syria will serve the national security interests of the United States, its allies, and our partners. If that reality can come to pass, it will be a victory for all, and it will support the ability of the Syrian people to pursue their own God-given rights of life, liberty and the pursuit of happiness.*” (USAID 2018).

Dalam pernyataan tersebut, kepentingan AS dan sekutu yang disebut oleh Tillerson ialah perdamaian global yang dicapai setelah selesainya perang sipil pasca diturunkannya Assad dari jabatannya dan keberhasilan dalam kontraterorisme ISIL. AS mempercayai bahwa dengan menurunkan Assad dan mendirikan institusi yang demokratis, tujuan utama AS yang merupakan kontraterorisme ISIL akan lebih mudah untuk dieksekusi. Seperti yang dijelaskan di atas pula, dalam pandangan liberal internasionalisme, negara yang tidak demokratis memiliki potensi menjadi *breeding ground* paham-paham terorisme dan hal tersebut ingin dihindari oleh AS melalui usahanya untuk mengimplementasikan institusi yang demokratis. Keinginan AS untuk membentuk institusi yang demokratis juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Suriah yang menginginkan adanya demokrasi di Suriah.

Dari pernyataan dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sikap AS yang bersikeras menginginkan diturunkannya Assad dari jabatannya dan didirikannya institusi pemerintahan yang demokratik di Suriah di dorong oleh keinginannya untuk menjaga perdamaian global dan menyebarkan paham demokrasi, yang sejalan dengan teori liberal internasionalisme. Meskipun begitu, melalui penelitian ini, selain penulis menemukan bahwa tujuan AS untuk melakukan pergantian rezim di Suriah didasari oleh keinginannya untuk menyebarkan demokrasi dengan landasan teori liberal internasionalisme terbukti benar, penulis juga kemudian menemukan bahwa ada tujuan yang lebih penting, yakni kontraterorisme ISIL. Tidak dapat dipungkiri AS menginginkan adanya demokrasi di Suriah agar perang sipil dapat berakhir dan stabilitas di Suriah kembali tercapai, tetapi penting pula untuk mengingat bahwa AS beranggapan kontraterorisme ISIL dan penggulingan Assad dari jabatannya harus berjalan beriringan. Jika Assad telah dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Suriah, proses transisi sistem pemerintahan yang otoriter ke demokratik menjadi lebih mudah, yang otomatis akan mempermudah AS dalam usaha kontraterorismenya terhadap ISIL.

## **Penutup**

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan dua hipotesis terkait perbedaan kebijakan kontraterorisme AS terhadap Boko Haram dan Nigeria. Pertama, AS kurang mengakomodir usaha kontraterorisme Boko Haram dikarenakan banyaknya kepentingan AS di Suriah. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan politik dan persaingannya dengan Rusia. Kedua, Presiden Bashar Al-Assad yang bersikap tidak ‘ramah’ terhadap pemerintahan AS merupakan halangan bagi AS untuk mewujudkan kepentingan nasional AS yang telah disebutkan di hipotesis pertama, sehingga, AS ingin melakukan pergantian rezim untuk mempromosikan demokrasi.



Melalui penjelasan-penjelasan di atas, penulis berhasil membuktikan hipotesis yang ditarik di awal penelitian dan dapat menyimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan usaha kontraterorisme Boko Haram dan ISIL oleh AS dikarenakan oleh banyaknya kepentingan AS di Suriah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu pertama, kontraterorisme ISIL sebagai usaha defensif sebelum serangan teror yang mengatasnamakan ISIL terjadi dalam teritori AS; kedua, membendung pengaruh Rusia di Timur Tengah untuk menjaga status AS sebagai negara hegemoni, serta; ketiga, keinginan untuk mengganti rezim Bashar al-Assad ke rezim yang lebih demokratis selain sebagai usaha untuk mengakhiri akses Rusia ke Timur Tengah, juga untuk menjaga stabilitas regional dan menjaga perdamaian global.

## Referensi

- Adibe, Jidefor. 2015. *Re-evaluating Boko Haram Conflict*. Februari 29. Diakses pada Desember 21, 2018. <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/02/29/re-evaluating-the-boko-haram-conflict/>.
- BBC. 2015. *Russia Joins War in Syria: Five Key Points*. Oktober 1. Diakses pada November 10, 2017. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34416519>.
- Berman, Eli. 2017. "Competing for Power: How Russian-American Relations Have Affected the War in Syria." *Politicus Journal* 4 (1).
- Blanchard, Christopher M., Carla E. Humud, and Mary Beth D, Nikitin. 2016. *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*. Yearly report, Congressional Research Service.
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations*. New York City: Palgrave.
- Calabria, Stephen. 2015. *Foreign Fighters flock to IS, but not to Boko Haram*. Februari 20. Diakses pada Desember 20, 2017. <http://www.dw.com/en/foreign-fighters-flock-to-is-but-not-to-boko-haram/a-18268533>.
- Campbell, John. 2014. *U.S. Policy to Counter Nigeria's Boko Haram*. New York City: Council of Foreign Relations.
- Council on Foreign Relations. n.d. *US War in Afghanistan*. Diakses pada September 21, 2016. <http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018>.
- Department of Defense. 2015. "Operation Inherent Resolve: Quarterly Report to the United States Congress." 43.
- Doucet, Lyse. 2016. *Why is Russia Engaged in Aleppo?* November 16. Diakses pada November 16, 2017. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37995780>.
- Doyle, Michael W. 1986. "Liberalism and World Politics." *The American Political Science Review* (American Political Science Association) 80 (4): 1151-1169.
- Foreign Assistance. 2018. *Syria Foreign Assistance*. Oktober. Diakses pada Oktober 5, 2018. <https://www.foreignassistance.gov/explore/country/Syria>.
- Herrera, Yoshiko, Andrew Kydd, and Fyodor Lukyanov. 2015. *The U.S. and Russian Intervention in Syria: Room for Cooperation or Prelude to Greater Conflict?* Paper, Working Group on Future of U.S. - Russia Relations.
- Hoffman, Stanley. 1995. "The Crisis of Liberal Internationalism." *Foreign Policy* 98: 159-177.
- Institute for Economic & Peace. 2015. *Global Terrorism Index 2015*. Yearly Report, National Consortium for the Study and Response of Terrorism University of Maryland.
- Institute for Economic and Peace. 2015. *Global Terrorism Index 2015*. Yearly Report, Institute for Economic and Peace.

- Issa, Antoun. 2016. *Is War in Syria America's Interest?* Oktober 13. Diakses pada November 15, 2017. <http://nationalinterest.org/feature/war-syria-americas-interest-18037?page=show>.
- Jahn, Beate. 2013. *Liberal Internationalism: Theory, History, Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Lawson, Marian L., and Susan B Espetin. 2017. *Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance*. CSR Report, Congressional Research Service.
- Rawls, John. 1999. *The Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Snyder, Glenn H. 2001. "Mearsheimer's World - Offensive Realism and the Struggle for Security." *International Security* Vol. 27 (1): 149-173.
- U.S. Department of State. 2014. *Boko Haram and U.S. Counterterrorism Assistance to Nigeria*. Fact Sheet, Washington D.C.: U.S. Department of State.
- . n.d. *Democracy*. Diakses pada Oktober 4, 2018. <https://www.state.gov/j/drl/democ/index.htm>.
- United Nations General Assembly. 2015. *Statement by His Excellency Mr. Vladimir Putin at the 70th Session of the UN General Assembly*. Translation of Statement, United Nations.
- USAID. 2018. *FACT SHEET: U.S. ASSISTANCE FOR THE PEOPLE OF SYRIA*. Januari 26. Diakses pada September 14, 2018. <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jan-26-2018-fact-sheet-us-assistance-people-syria>.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. Adison-Welsey.
- White House Office of Secretary. 2013. *Statement by the President Announcing \$155 Million in Additional Humanitarian Assistance to Syrian People*. Januari 29. Diakses pada September 12, 2018. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/01/29/statement-president-announcing-155-million-additional-humanitarian-assis>.
- White House. 2015. *Remarks by the President at the Summit on Countering Violent Extremism / February 19, 2015*. Februari 19. Diakses pada September 14, 2018. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/19/remarks-president-summit-countering-violent-extremism-february-19-2015>.
- . 2014. *Statement by the President on ISIL*. September 10. Diakses pada Desember 27, 2017. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1>.